

ANALISIS PERAN KOMUNITAS PKK DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

Aldian Novitasari, Laila Kholid Alfirdaus

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman <https://fisip.undip.ac.id/> E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi dari adanya kebijakan perlindungan anak, serta mengidentifikasi peran penting komunitas PKK dalam mencapai tujuan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terpadu kepada anak. Metode yang digunakan berupa kualitatif, serta lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Sasaran dari studi ini yaitu PKK Kecamatan Gunem dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dari adanya tindakan diskriminasi dan kekerasan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori dalam penelitian ini berupa teori “State Ibuism” (Julia, Suryakusuma 1991) dan teori “Pengaruh Masyarakat” (Barnes, 2004). Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan Peran PKK Kecamatan Gunem menuju transformasi meskipun masih terdapat elemen domestifikasi dalam program kerja PKK. Dengan demikian, perubahan dilakukan secara bertahap tanpa sepenuhnya mengabaikan konteks peran domestik yang masih dianggap penting di masyarakat. PKK juga berkolaborasi dengan unit pelayanan seperti P2TP2A dan PUSPAGA dalam memberikan pelayanan dan konsultasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, maupun pernikahan dini. Capaian yang sudah diperoleh yaitu PKK Kecamatan Gunem telah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak. PKK desa juga berkolaborasi dengan KPAD, FAD, dalam memberikan perlindungan dan hak anak. Rekomendasi terkait dengan penelitian ini berkaitan dengan penguatan perubahan (transformasi) sambil mempertahankan nilai-nilai domestik yang masih relevan di lingkup masyarakat, di antaranya pemerintah harus tegas dalam membuat aturan yang berkaitan dengan sanksi kepada orang tua anak apabila terjadinya pernikahan dibawah umur.

Kata Kunci: Strategi, Peran PKK, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research aims to provide recommendations or solutions to the child protection policy, as well as identify the important role of the PKK community in achieving goals by providing integrated protection and services to children. The method used is qualitative, and the location of this research is in Gunem Sub-district, Rembang Regency. The target of this study is the PKK Gunem Sub-district in educating the community on the importance of providing protection to children from discrimination and violence. This research was conducted with interviews, observation, and documentation. The theory in this study is the theory of “State Ibuism” (Julia, Suryakusuma 1991) and the theory of “Community Influence” (Barnes, 2004). The results showed a change in the role of PKK Gunem Sub-district towards transformation although there are still elements of domestication in the PKK work program. Thus, changes are made gradually without completely ignoring the context of domestic roles that are still considered important in society. PKK also collaborates with service units such as P2TP2A and PUSPAGA in providing services and consultations for children who are victims of violence, discrimination, and early marriage. The achievements that have been obtained are that the PKK Gunem Sub-district has implemented programs related to child protection. The village PKK also collaborates with KPAD, FAD, in providing child protection and rights. Recommendations related to this research are related to strengthening change (transformation) while maintaining domestic values that are still relevant in the community, including the government must be firm in making rules relating to sanctions for parents of children if underage marriage occurs.

Keywords: Strategy, PKK Role, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak tersebut semakin rasional dan aktual di dalam lingkungan sosial (Maulana H. W., 2000). Peraturan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kabupaten Rembang telah menerapkan kebijakan terkait perlindungan anak pada tahun 2014 dengan menetapkan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Pada anak
Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Rembang
2019-2023

Tahun	Jenis Kekerasan				Jumlah
	Fisik	Seksual	Psikologi	Penelantaran	
2019	4	7	-	-	11
2020	4	12	1	-	17
2021	3	10	-	-	13
2022	4	10	-	-	14
2023	8	5	-	1	14

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

Angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan pada anak dari kasus yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 17 kasus kekerasan yang dialami anak.

Sedangkan untuk kasus kekerasan anak di Kabupaten Rembang yang mengalami penurunan kasus yaitu terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 11 kasus. Adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak bisa disebabkan adanya faktor dari permasalahan ekonomi, maupun dari tingkat pendidikan yang rendah.

Penelitian ini mengacu pada peran tim Penggerak PKK dalam upaya menerapkan strategi kebijakan dalam mencegah dan mengurangi diskriminasi yang sering terjadi pada tingkat keluarga dan komunitas. Dengan jangkauan hingga tingkat desa, PKK Kecamatan Gunem menjadi garda terdepan di dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah untuk anak. Melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan program lainnya yang menyangkut partisipasi anak dalam berinteraksi dan berpendapat. Tujuannya adanya tim penggerak PKK di setiap daerah yaitu memperdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan peranan wanita Indonesia. Keberhasilan program-program PKK Kecamatan juga membutuhkan penguatan kapasitas kader PKK tingkat Kecamatan maupun Desa.

Pembahasan ini difokuskan kepada partisipasi ibu PKK yang ada di Kecamatan Gunem dalam hal

pemberdayaan masyarakat terkait perlindungan anak yang bisa diterapkan untuk memberikan pendampingan kepada anak. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul untuk penelitian ini “Analisis Peran Komunitas Pkk Dalam Melaksanakan Strategi Perlindungan Anak Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Komunitas Ibu PKK dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kecamatan Gunem ?
2. Sejauhmana peran ibu PKK di desa Gunem dan desa Tegaldowo dalam berkontribusi pada transformasi kesetaraan perempuan terkait dengan perlindungan anak, memperlemah atau justru memperkuat domestifikasi ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan selama penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga

peneliti menyajikan data deskriptif berdasarkan hasil yang ditemukan penulis.

Teori yang digunakan ada dua yang pertama terkait konsep “*State Ibuism*” dari buku Julia Suryakusuma, 2021. Konsep ibuisme negara menjelaskan adanya peran pemerintah dari orde baru dalam memperkenalkan pengorbanan diri kaum perempuan untuk tujuan mereka sendiri (Suryakusuma, 1991). Untuk teori kedua yaitu teori pengaruh masyarakat dari buku “*Children and families in communities: Theory, research, policy and practice*” dari Barnes, J. (2004). Menjelaskan terkait lingkungan tempat tinggal yang dipenuhi dengan komunitas-komunitas juga sangat penting bagi pertumbuhan anak dan keluarga.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah sekaligus perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Rembang berada pada garis koordinat 111°00'–111°30' Bujur Timur dan 6°30'–7°6' Lintang Selatan (RPJM Kabupaten Rembang 2016). Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang diantaranya yaitu :

1. Sebelah Selatan perbatasan dengan Kabupaten Blora
2. Sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten Pati
3. Sebelah Timur Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Permasalahan atau isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Rembang ini tertuang pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Rembang terkait RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas tata kelola pemerintah
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM)
3. Penguatan inovasi dan daya saing produksi pada sector perekonomian
4. Pengendalian tata ruang dan penyediaan insfrastruktur dan ketersediaan air baku
5. Meningkatkan ancaman krisis akibat adanya perubahan iklim, bencana alam, dan penyakit menular
6. Angka kemiskinan
7. Penguatan kemandirian desa.

Isu untuk permasalahan pembangunan gender dan hak anak serta pembangunan keluarga berkualitas tersirat pada poin ke dua yaitu “Kualitas sumber daya manusia (SDM)”. Untuk permasalahan dalam pernikahan anak di Kabupaten Rembang sendiri mengalami penurunan kasus pada tahun 2024. Berikut grafik tersaji grafik Jumlah

Perkawinan anak di Kabupaten Rembang

Grafik

Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Rembang



Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, 2024

Grafik tersebut menjelaskan bahwa angka kasus pernikahan dini Kabupaten Rembang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari adanya tanggungjawab dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk adanya peran PKK dalam lingkup masyarakat. Untuk isu permasalahan lainnya yang saat ini sedang di prioritaskan juga terkait dengan adanya gizi buruk (stunting) dan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang. Kebijakan tersebut menjadi acuan dasar hukum yang mengatur upaya-upaya penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Rembang.

**Grafik
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten
Rembang**



*Sumber: Data Bappeda Kabupaten
Rembang*

Grafik menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Rembang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Stunting merupakan bagian dari perlindungan anak, maka dari itu penanganan stunting menjadi fokus prioritas Kabupaten Rembang untuk menurunkan kasus stunting, karena Kabupaten Rembang sendiri memiliki program “*Rembang Zero New Stunting*”.

Kecamatan Gunem Gunem termasuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Luas wilayah Kecamatan Gunem sebesar 8.020,341 hektar. Jumlah kependudukan yang ada di Kecamatan Gunem berdasarkan data dari Dindikcapil Kabupaten Rembang pada tahun 2023 yaitu sebanyak 24.875 jiwa.

**Kebijakan Perlindungan Anak di
Kecamatan Gunem**

Berdasarkan surat keputusan Camat Gunem Nomor 411.4/16/2021 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Gunem. Surat keputusan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program Germas yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat melalui pendekatan promotif (edukasi maupun sosialisasi) dan preventif (pencegahan).

**Tabel
Prevelensi Balita Stunting
Kec.Gunem**

PREVALENSI BALITA STUNTING KECAMATAN GUNEM		KASUS STANTING KECAMATAN GUNEM
2021	8.57%	119
2022	7.42%	105
2023	14.05%	162

*Sumber: Data Bappeda Kabupaten
Rembang*

Kecamatan Gunem juga mengeluarkan surat keputusan Nomor 440/20/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk sebagai bagian dari strategi Kabupaten Rembang dalam mendukung target

nasional penurunan angka stunting Dalam pelaksanaannya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melibatkan berbagai masyarakat seperti dari kader posyandu, bidan desa, kader dari pokja IV TP. PKK Kecamatan Gunem, PLKB Kecamatan Gunem, ketua TP PKK Kecamatan Gunem, dan organisasi masyarakat di Kecamatan Gunem. Adapun program yang dijalankan untuk Kecamatan Gunem sendiri yaitu berupa pemberian telur kepada masyarakat didesa.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan bu Sukini selaku Ketua TP PKK Kecamatan Gunem :

“...apalagi sekarang itu sekarang itu setiap jum’at di Kecamatan Gunem memberikan telur untuk anak-anak yang mengalami stunting. Untuk telur ini didapat dari Pokpan, jadi setiap hari kamis telur di drop di Kecamatan...”

Selain program telur, pihak dari kecamatan juga memberikan pendampingan bagi keluarga dengan risiko tinggi, dan memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Melalui peran aktif TPPS, Kecamatan Gunem diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung adanya tumbuh kembang pada anak, mengurangi risiko gangguan kesehatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masa depan.

Strategi PKK dalam Perlindungan Anak di Kecamatan Gunem

Strategi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan PKK Kecamatan Gunem dalam memberikan perlindungan dari adanya diskriminasi dan pemenuhan hak anak yaitu mencangkup pemberian pelayanan yang berbasis komunitas. Fasilitas pelayanan yang disediakan Pemerintah seperti Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program kerja dari serangkaian kegiatan diwujudkan dengan program-program unggulan PKK ditingkat kecamatan dan desa. PKK Kecamatan Gunem bersama dengan TP PKK Kabupaten berkerja sama dengan P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan anak, terutama kepada korban kekerasan dan diskriminasi.

Dalam bidang-bidang di PKK Kecamatan terdapat program yang menjadi prioritas untuk keberjalanan setiap agenda. Hal inilah menjadi strategi PKK Kecamatan Gunem untuk memberikan pemberdayaan dan kesejahteraan bagi anak, maupun bagi masyarakat sekitar. Untuk program kerja PKK Kecamatan Gunem tersusun karna adanya kerja sama dengan pengurus PKK Kecamatan dan bimbingan dari TP. PKK Kabupaten Rembang. Cangkupan Strategi Kebijakan PKK Kecamatan Gunem

dalam memberikan perlindungan bagi anak yaitu melalui adanya :

1. Program sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital, hal ini menjadi program kerja PKK Kecamatan Gunem dengan tujuan membantu orang tua memahami tantangan yang terjadi di era modern saat ini. Salah satu fokusnya yaitu pencegahan adanya OCESA (Online Child Exploitation and Sexual Abuse) pada anak di dunia maya. Edukasi yang dilakukan bisa berupa peningkatan literasi digital kepada orang tua dan anak tentang penggunaan teknologi yang aman dengan mengenali tanda-tanda adanya eksploitasi secara online. Kemudian PKK juga bisa berkerjasama dengan pihak P2TP2A, PUSPAGA, KPAD, dalam hal memberikan dukungan hukum bagi korban kasus eksploitasi online.
2. Program sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur bagi perempuan, program ini menjadi fokus utama dari permasalahan sosial dan pelanggaran hak anak yang terjadi di Kecamatan Gunem. Dalam program ini, PKK Kecamatan Gunem memanfaatkan layanan P2TP2A sebagai pusat edukasi kepada keluarga dan masyarakat terkait dampak pernikahan dini.

P2TP2A berperan menyediakan layanan konseling bagi remaja dan orang tua, serta menjadi tempat untuk melaporkan kasus terkait pernikahan dini yang melanggar hukum. Kader PKK bertugas sebagai fasilitator untuk menyampaikan informasi terkait dampak dari pernikahan dini dalam hal kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak perempuan.

Peran Komunitas PKK Desa Gunem dan Desa Tegaldowo

Peran komunitas PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo menjadi kunci dalam mendorong implementasi strategi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Sebagai organisasi yang berakar kuat di masyarakat, PKK mampu menjangkau keluarga secara langsung untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, pentingnya lingkungan yang aman, serta dukungan tumbuh kembang yang optimal. Melalui program-program seperti edukasi kesehatan, pelatihan parenting, dan penguatan jaringan perlindungan anak berbasis komunitas, PKK dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak di desa-desa tersebut mendapatkan

perlindungan maksimal dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Peran TP. PKK Desa Gunem

Rini Widiyanti menjelaskan bahwa PKK berkolaborasi dengan posyandu berusaha untuk menekan angka penurunan stunting di Desa Gunem. Untuk kondisi terkait kasus stunting di Desa Gunem untuk saat ini sudah lumayan mengalami penurunan hal tersebut disampaikan langsung oleh Rini Widiyanti :

“...untuk saat ini kasus stunting di desa gunem sendiri sudah lumayan mengalami penurunan. Ya karna kita bener-bener menekan dan memberikan pengarahan supaya anak-anak bisa mendapatkan peningkatan gizi.”

Dalam menjalankan program tim PKK juga harus bisa dekat dengan masyarakat desa, supaya memberikan kemudahan dalam pemberian informasi kepada masyarakat maupun keluarga. Tim PKK Desa Gunem memiliki cara dalam melakukan pendekatan kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi terkait program kebijakan perlindungan anak. Dalam pendekatannya tim PKK akan melakukan sosialisasi maupun memberikan edukasi melalui pertemuan di dalam BKR (Bina Keluarga Remaja), selain itu untuk

sosialisasi dan edukasi bagi remaja PKK akan masuk ke posyandu remaja dan selama kegiatan di posyandu remaja biasanya pihak dari puskesmas maupun bidan desa akan ikut terlibat didalam memberikan pembekalan edukasi bagi para remaja di Desa Gunem. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan bu Rini :

“itu kita ada yang namanya BKR (Bina Keluarga Remaja), yang mana orang tuanya kita undang dan diberikan sosialisasi. Dan untuk remajanya sendiri kita juga ada posyandu remaja, nanti dari puskesmas, bidan desa akan memberikan edukasi dan sosialisasi ke remajanya pada saat kegiatan posyandu remaja.”

Dalam keanggotaan KPAD Desa Gunem ini semua pengurus terdapat dari anggota PKK, maupun dari kalangan guru. Sehingga dalam menjalankan peran, KPAD juga akan bekerjasama dengan PKK, maupun dengan pemdes Gunem.

Dalam wawancara dengan Umi Hanik selaku anggota pengurus KPAD, memberikan penjelasan terkait dengan tantangan KPAD dalam melibatkan ibu PKK dalam program perlindungan anak:

“...waktu itu sempat ada kasus, tetapi karna kasus tersebut menggunakan teknologi jadinya kita kurang bisa, meskipun sempat dihapus tetapi yang namanya jejak digital pastinya masih

bisa download juga. Jadinya kelemahan kita ya di itu kemajuan teknologi saat ini.”

Dalam pernyataan tersebut Umi Hanik, mengatakan bahwa kasus yang berhubungan dengan teknologi media social akan sangat sulit untuk menghapuskan jejaknya. Maka dari itu, jika berkaitan dengan teknologi KPAD desa maupun PKK juga akan kesulitan untuk menyelesaikannya.

Mungkin untuk sekarang, KPAD dalam mengatasi tantangan tersebut sementara belum bisa jika berhubungan dengan penggunaan teknologi, namun untuk mengatasi tantangan lainnya mungkin KPAD bisa bekerjasama dengan PKK. Karna dalam PKK terdapat pertemuan rutin yang dimana setiap pertemuan tersebut jika terdapat suatu kasus pasti akan dilakukan sosialisasi. Hal tersebut sesuai dari wawancara bersama Umi Hanik :

“...kalau dengan teknologi mungkin belum, Cuma ya lewat ini sosialisasi seperti itu malah lebih nyambung. PKK kan itu ada pertemuan rutin jadi setiap ada kasus pasti akan selalu dilakukan sosialisasi...”

Dengan demikian, fokus KPAD Desa Gunem kedepan dalam meningkatkan peran ibu PKK akan sering melakukan kolaborasi bersama dalam memberikan informasi maupun edukasi.

Peran TP. PKK Desa Tegaldowo

Surat Keputusan dari Kepala Desa Tegaldowo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Periode 2020-2025. Berdasarkan wawancara dengan bu Suharti selaku ketua kader PKK di Desa Tegaldowo, beliau menjelaskan peranan dari PKK di Desa Tegaldowo dalam memberikan dukungan dari adanya kebijakan program perlindungan anak sendiri seperti apa: *“peran saya dalam mendukung kebijakan tersebut adalah tentu saja disini kita akan memberikan masukan kepada warga-warga bagaimana supaya anak itu mendapatkan hak-haknya kemudian bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu sebagaimana mestinya, bagaimana kita mengayomi anak supaya dia mendapatkan kenyamanan, pendidikan termasuk bagaimana kedepannya supaya anak bisa mencapai cita-citanya seperti itu.”*

Suharti menjelaskan bahwa peran PKK di Desa Tegaldowo tersebut menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak agar mereka dapat memperoleh hak-haknya secara penuh. Hal ini mencakup hak atas perlindungan,

kenyamanan, dan pendidikan yang layak.

Kepala Desa Tegaldowo menjelaskan terkait adanya konsep desa layak bagi anak yang ada di Galdowo yaitu bahwa desa mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Konsep ini mencakup penyediaan sarana dan program yang mendidik dan melibatkan anak serta remaja dalam kegiatan positif. Salah satu inisiatifnya adalah penerapan posyandu remaja, yang tidak hanya menyediakan layanan kesehatan tetapi juga edukasi tentang isu-isu penting seperti pencegahan pernikahan dini, gaya hidup sehat, dan pergaulan yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Joko selaku Ketua Kampung Keluarga Berkualitas (KB), menceritakan bahwa pada tahun 2016 Desa Tegaldowo memang terkenal akan kasus pernikahan dini. Hal tersebut didasari karna dalam Desa Tegaldowo terdapat adat istiadat yang memang memaksa anak dibawah umur dipinang oleh seseorang, dan jika adat tersebut ditolak ada anggapan hal tabu yang diberikan, tradisi tersebut bernama "Ngemblok". Yang mana orang tua dari pihak gadis diharuskan untuk menerima lamaran pernikahan daripada mendapatkan anggapan menjadi perawan tua. Namun, untuk sekarang kasus pernikahan dini yang ada di Desa Galdowo sudah

mengalami penurunan, hal ini karna kebanyakan dari anak-anak disana sudah memiliki pemikiran yang berkembang. Semenjak dibangunnya SMK N 1 Gunem banyak anak-anak yang sudah mulai melanjutkan pendidikannya ke SMK.

Implikasi Akademik Pkk

Dalam hal ini peneliti melihat adanya peran PKK dan upaya transformasi di tengah domestifikasi yang terjadi di Kecamatan Gunem. Kebijakan program yang telah dilakukan PKK terkait persoalan perlindungan anak di desa Gunem yaitu terkait dengan penurunan stunting yang mana peran PKK bersama posyandu memberikan makanan-makanan yang bergizi selama kegiatan posyandu berlangsung, sedangkan di Desa Tegaldowo program yang sama terkait stunting dengan pemberian MPASI kepada balita. Adanya program dari kedua desa ini membuktikan implikasi yang berdampak positif bagi upaya perlindungan anak. Program ini, tentunya sangat efektif untuk mencegah kasus stunting di kedua desa tersebut. Dengan memasukkan nilai-nilai dan pendekatan yang mendukung adanya kesetaraan gender ke dalam aspek kebijakan, program, atau aktivitas tertentu, PKK dapat memastikan bahwa peran orang tua, baik ayah maupun ibu, mempunyai

kontribusi yang seimbang. Kontribusi ini berimplikasi pada terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, mendukung, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Terkait kontribusi yang dilakukan, Desa Tegaldowo memberikan hak bagi anak yang tidak memiliki akte kelahiran, supaya anak dapat mendapatkan hak pendidikannya. Terkait dengan dasar adanya kesetaraan gender penelitian ini memberikan penjelasan bahwa adanya pandangan kesetaraan gender tidak berarti penyamaan dalam konteks biologis, tetapi menghargai kontribusi keduanya secara adil dalam menjalankan peran sebagaimana mestinya dalam memberikan perlindungan. Langkah ini tepat untuk dilakukan, demi keberhasilan program dari TP PKK. Argumen tersebut berdasarkan pada teori state Ibuisme, yang mengarah pada peran PKK dalam upaya transformasi di tengah domestifikasi.

Pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak, tanggung jawab ekonomi, dan pengambilan keputusan rumah tangga harus bisa dibagi secara adil. Sehingga tidak menimbulkan stereotip perempuan yang memiliki tanggung jawab terkait urusan domestic atau pengasuhan anak. Jika dilihat didalam konteks teori Barnes, PKK dapat dianggap sebagai agen

pemberdayaan berbasis komunitas yang berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui dukungan sosial, pelatihan keterampilan, dan tindakan kebijakan yang berfokus pada peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam teori Julia Suryakusuma (2021) menjelaskan bagaimana “state ibuisme” pada masa orde baru memanfaatkan peran tradisional perempuan hanya berfungsi sebagai pendukung suami tanpa diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Namun, jika dikaitkan dengan peran PKK Kecamatan gunem sekarang, para anggota di berikan kesempatan untuk berbicara di ruang public maupun domestic, hal ini dikarenakan perempuan juga memiliki peran dalam melakukan perubahan di dalam keluarga maupun pemimpin di komunitas. Dalam hal ini dapat ditunjukkan bagaimana PKK Kecamatan Gunem menerapkan bagaimana anggota yang didominasi perempuan dalam kesempatan pertemuan rapat internal PKK ataupun kesempatan lainnya berani menyampaikan pendapat. , dengan demikian anggota PKK dapat memberikan contoh dan tauladan khususnya bagi perempuan di wilayah Kecamatan Gunem, bahwa perempuan juga dapat memiliki peran dan

sumbangsih yang sama seperti halnya dengan laki-laki.

Relevansi terhadap penelitian juga digunakan untuk memperkuat argumen mengenai pentingnya peran komunitas PKK dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rembang, khususnya di Kecamatan Gunem. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Agustin Laily Nikmatul, Slamet M., Roni P.W (2019), menyoroti adanya keberhasilan PKK dalam mengintegrasikan program-program kesehatan yang mencakup anak, ibu hamil, dan lansia, yang selaras dengan 10 program pokok PKK. Peneliti berusaha melengkapi dan memperkuat temuan yang telah peneliti temukan di lapangan sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam mendukung strategi kebijakan perlindungan anak melalui peran PKK di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang juga diharapkan dapat menginspirasi kebijakan berbasis komunitas di wilayah lain.

Strategi kebijakan perlindungan anak yang bisa dilakukan PKK Kecamatan Gunem dalam memberikan hak-hak anak, diantaranya:

- a) Program kerja yang berkolaborasi dengan DINSOSPPKB
PKK Kecamatan Gunem bersama PUSPAGA dapat menyelenggarakan pelatihan parenting untuk meningkatkan kesadaran keluarga terkait

pentingnya pola asuh dan tumbuh kembang anak. PUSPAGA sendiri bisa dimanfaatkan untuk pendamping pernikahan dini maupun konseling terkait korban diskriminasi atau kekerasan. Program ini melibatkan orang tua khususnya peranan seorang ibu, dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan pendekatan pola asuh berbasis kasih sayang dan memberikan pendidikan selama 12 tahun. Selain PUSPAGA, PKK Kecamatan Gunem melibatkan P2TP2A dalam layanan konsultasi terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan. TP. PKK Kabupaten menjadi salah satu tempat konsultasi/penganduan atas perlindungan anak bagi korban. Sehingga peran PKK Kecamatan sebagai fasilitator untuk masyarakat desa dalam memberikan pengarahan bagi orang tua dalam memberikan pola asuh.

- b) Penguatan Kader PKK untuk Pencegahan
PKK Kecamatan Gunem memberikan pelatihan edukasi kepada para kader-kader desa dalam upaya strategi komunikasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini sekaligus, memberikan edukasi terkait peran

orang tua dalam memberikan pendekatan kepada anak. Pelatihan yang diberikan mencakup dampak pernikahan dini kepada anak, peraturan hukum yang melindungi anak dari pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan teori pengaruh masyarakat (barnes,2004) Peran PKK untuk memastikan anak memperoleh haknya secara penuh, sehingga PKK Kecamatan Gunem dalam menjalankan fungsi ini melalui strategi dan program kerja yang disesuaikan dengan dukungan hak anak di lingkup masyarakat desa. PKK Kecamatan pada dasarnya menjadi perantara dalam melaporkan kasus kekerasan atau diskriminasi kepada instansi terkait seperti P2TP2A. Keterlibatan masyarakat berdasarkan teori Barnes (2004) dalam menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak, menjadikan teori ini relevan digunakan dalam studi penelitian. Selain itu, adanya transformasi kesetaraan gender pada anak perempuan menjadikan PKK ikut berkontribusi dalam memberikan perhatian kepada anak perempuan yang rentan akan tindakan diskriminasi dan pelecehan.

Berdasarkan referensi Julia, (2021) studi ini terdapat faktor pendukung yang memperkuat adanya transformasi social yang terjadi di Kecamatan Gunem diantaranya :

a. Teknologi Digital

Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunem sejauh ini telah menggunakan media social untuk menyebarkan informasi dan mengorganisasi kegiatan, hal ini terbukti terdapat grup WhatsApp untuk tim pengurus PKK Kabupaten Maupun Tim PKK Kecamatan dan desa.

b. Kebijakan Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan dukungan seperti adanya program dana desa yang bisa digunakan Tp PKK untuk memungkinkan PKK berpartisipasi dalam pembangunan desa yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan Tp PKK Desa Gunem dan Tp PKK Desa Tegaldowo yang sama-sama mendapatkan dana bantuan dari desa untuk menjalankan setiap program prioritas desa, sedangkan untuk TP PKK Kecamatan Gunem sumber dananya bersumber dari APBD.

c. Kesadaran Gender

PKK tidak lagi hanya menjadi penggerak program domestic, tetapi juga platform pemberdayaan yang relevan dengan tantangan era modern. Dengan meningkatnya kesadaran gender, PKK berupaya mengintegrasikan kesetaraan gender dalam setiap programnya, memberdayakan perempuan untuk tidak hanya berperan di rumah, tetapi juga sebagai pemimpin,

motivator, dan komunitas perubahan di masyarakat.

KESIMPULAN

Peneliti menilai adanya kaitannya dengan teori “state ibuisism” Julia (2021) yang mengarah pada peran domestifikasi atau transformasi social kepada komunitas Tim Penggerak PKK di Desa Gunem dan Desa Tegaldowo. Dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa untuk kedua desa tersebut Desa Gunem dan Desa Tegaldowo telah mengalami proses transformasi social meskipun masih terdapat elemen domestifikasi yang dilakukan didalam program kerja PKK di Desa Gunem dan Tegaldowo. Dengan memasukkan nilai-nilai dan pendekatan yang mendukung adanya kesetaraan gender ke dalam aspek kebijakan, program, atau aktivitas tertentu, PKK dapat memastikan bahwa peran orang tua, baik ayah maupun ibu, mempunyai kontribusi yang seimbang. Kontribusi ini berimplikasi pada terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, mendukung, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

PKK Kecamatan juga menjadi tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, bersama unit pelayanan seperti P2TP2A dan PUSPAGA, bertujuan untuk memberikan tempat aman kepada anak dan memberikan konsultasi dalam

permasalahan yang terjadi pada anak. Melalui program kerja yang tersusun, kolaboratif, dan partisipasi masyarakat, PKK Kecamatan Gunem diharapkan mampu menjadi agen dalam memberikan pelayanan dan sekaligus perubahan dalam mendidik masyarakat untuk terlibat dalam pemberian hak pada anak. Dengan strategi kebijakan yang tepat, PKK bisa menciptakan lingkungan yang memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat.

REKOMENDASI

Apapun rekomendasi strategi yang bisa di berikan peneliti terkait dengan studi peran PKK Kecamatan Gunem, diantaranya :

1. Kepada Pemerintah : PKK memerlukan peningkatan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah seperti DinsosPPKB, Dinkess, Dindikpora dan non pemerintah (NGO) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Nantinya strategi program tersebut bisa berupa dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, maupun program pengawasan. Selain itu, pemerintah harus dengan tegas dalam membuat aturan yang berkaitan dengan sanksi kepada orang tua anak seandainya terjadinya pernikahan dibawah umur.
2. Kepada masyarakat : dalam hal ini diharapkan masyarakat perlu

meningkatkan kesadaran untuk bisa ikut terlibat dalam berbagai kegiatan PKK desa terkait keberjalanan program kerja yang berkaitan dengan isu perlindungan anak, supaya bisa menciptakan lingkungan yang bisa mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, masyarakat khususnya orang tua juga harus bisa mendukung program pemerintah lainnya untuk tidak menikahkan anaknya yang di bawah umur.

3. Penelitian selanjutnya : untuk memperdalam pengetahuan terkait peran PKK ini, penelitian selanjutnya nanti bisa melakukan studi penelitian terkait dengan fokus PKK terhadap teknologi dalam upaya meningkatkan program perlindungan anak, atau bisa berkaitan dengan analisis terkait dengan dampak program PKK dengan lembaga pemerintah terhadap perlindungan anak.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut nantinya bisa memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di lingkup desa, sekaligus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan di lingkup desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, J. (2004). *Children and families in communities: Theory, research, policy and practice*. John Wiley & Sons.
- Maulana Hasan Wadang. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana. Jakarta, 2000. Halaman 1.
- Suryakusuma, Julia. 1991. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. *New Asian Visions* 6(2): 46-71.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak Tahun 2016 - 2020
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak